

**PERAN KEPALA SEKOLAH SEBAGAI ADMINISTRATOR PENDIDIKAN  
BERBASIS KEARIFAN LOKAL PAPUA DALAM MENINGKATKAN MOTIVASI  
BELAJAR SISWA SD TERPENCIL  
(STUDI DI DISTRIK KAMBRAU, PAPUA BARAT)**

Maria Placida Iwitiyu<sup>1</sup>, Sri Handayani<sup>2</sup>, Eva Dianawati Wasliman<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Universitas Islam Nusantara

<sup>1</sup>[mplacida53@gmail.com](mailto:mplacida53@gmail.com), <sup>2</sup>[srihandayani@uninus.ac.id](mailto:srihandayani@uninus.ac.id),

<sup>3</sup>[evadianawatiwasliman@uninus.ac.id](mailto:evadianawatiwasliman@uninus.ac.id)

**ABSTRACT**

*Low student learning motivation in remote elementary schools is often caused by geographical barriers and sociocultural conflicts, as seen in the enrollment decline at SD YPPK Kambrau, Kambrau District, West Papua, from 73 students (2024) to 65 (2025). This study analyzes the role of the school principal as educational administrator in enhancing learning motivation through integration of Papuan local wisdom. Employing a qualitative phenomenological approach and intrinsic case study, data were collected via in-depth interviews, participatory observation, and document analysis involving the principal, two teachers, and parents. Findings reveal four key administrative functions: (1) participatory planning based on motivation analysis, (2) adaptive instruction aligning academic schedules with customary seasons, (3) development-oriented evaluation, and (4) transforming environmental obstacles into contextual learning opportunities. The novelty lies in a contextual transformational leadership model integrating Papuan customs, fulfilling students' psychological needs according to Self-Determination Theory (autonomy, competence, relatedness). Implications emphasize that educational administration effectiveness in 3T regions depends on managerial flexibility and respect for local wisdom, supporting SDGs Goal 4 and the context-based Merdeka Curriculum.*

**Keywords:** *educational administration, school principal, learning motivation, Papuan local wisdom, remote school*

**ABSTRAK**

Rendahnya motivasi belajar siswa di sekolah dasar terpencil sering dipicu oleh tantangan geografis dan benturan sosiokultural, terlihat pada penurunan jumlah siswa SD YPPK Kambrau, Distrik Kambrau, Papua Barat dari 73 orang (2024) menjadi 65 orang (2025). Penelitian ini bertujuan menganalisis peran kepala sekolah sebagai administrator pendidikan dalam meningkatkan motivasi belajar melalui integrasi kearifan lokal Papua. Menggunakan pendekatan kualitatif fenomenologi dan studi kasus intrinsik, data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan analisis dokumen terhadap kepala sekolah, dua guru, serta orang tua

siswa. Hasil mengungkap empat fungsi administratif utama: (1) perencanaan partisipatif berbasis analisis motivasi siswa, (2) pelaksanaan pembelajaran adaptif dengan penyelarasan jadwal sekolah dan musim adat, (3) evaluasi berorientasi pembinaan, serta (4) transformasi hambatan lingkungan menjadi peluang pembelajaran kontekstual. Kebaruan penelitian terletak pada model kepemimpinan transformasional kontekstual yang mengintegrasikan adat Papua, memenuhi kebutuhan psikologis siswa sesuai Self-Determination Theory (*autonomy, competence, relatedness*). Implikasinya, efektivitas administrasi pendidikan di daerah 3T bergantung pada fleksibilitas manajerial dan penghormatan kearifan lokal, mendukung pencapaian SDGs Goal 4 serta implementasi Kurikulum Merdeka yang berbasis konteks lokal.

**Kata Kunci:** administrasi pendidikan, kepala sekolah, motivasi belajar, kearifan lokal Papua, sekolah terpencil

### **A. PENDAHULUAN**

Kualitas pendidikan di sekolah dasar (SD) merupakan fondasi utama dalam pembangunan sumber daya manusia suatu bangsa, yang sangat bergantung pada efektivitas administrasi pendidikan. Administrasi pendidikan mencakup pengelolaan sumber daya secara holistik, termasuk perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi proses belajar mengajar (Mulyasa, 2011). Di tengah dinamika pendidikan modern, peran kepala sekolah sebagai administrator menjadi krusial dalam memastikan tercapainya tujuan pendidikan nasional, seperti yang ditegaskan dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003.

Kepala sekolah sebagai administrator bertanggung jawab atas berbagai aspek operasional sekolah, mulai dari pengelolaan kurikulum, kesiswaan,

personalia, sarana prasarana, hingga keuangan (Purwanto, 2012). Menurut Hoy dan Miskel (2008), administrasi pendidikan yang efektif memerlukan integrasi antara kepemimpinan manajerial dan transformasional untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif. Namun, tantangan ini semakin kompleks di wilayah dengan kondisi geografis dan sosiokultural yang unik, di mana administrasi konvensional sering kali tidak adaptif.

Terdapat kesenjangan signifikan dalam praktik administrasi pendidikan antara wilayah perkotaan dan daerah terpencil, khususnya di wilayah 3T (Terdepan, Terluar, Tertinggal). Di wilayah perkotaan seperti Pulau Jawa, administrasi sekolah didukung oleh infrastruktur digital canggih dan aksesibilitas yang tinggi, memungkinkan implementasi sistem manajemen berbasis teknologi (BPS,

2024). Sebaliknya, di Papua Barat khususnya distrik pedalaman kepala sekolah menghadapi hambatan geografis ekstrem, seperti akses transportasi terbatas dan isolasi dari pusat pemerintahan, yang memengaruhi efisiensi administrasi.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) Papua Barat (2024) menunjukkan bahwa Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi (IP-TIK) di wilayah pedalaman masih jauh di bawah rata-rata nasional, mencapai hanya sekitar 30% dari standar nasional. Hal ini memperburuk tantangan administrasi pendidikan, di mana kepala sekolah harus mengandalkan metode manual untuk pengelolaan data siswa dan guru. Akibatnya, proses pendidikan di daerah 3T sering kali terganggu, menyebabkan rendahnya partisipasi siswa dan kualitas output pendidikan.

Kondisi empiris di SD YPPK Kambrau, Distrik Kambrau, Papua Barat, menjadi contoh nyata dari masalah tersebut. Jumlah siswa mengalami penurunan drastis dari 73 orang pada tahun 2024 menjadi hanya 65 orang pada tahun 2025, yang mengindikasikan rendahnya motivasi belajar siswa (Data Sekolah, 2025). Penurunan ini dipicu oleh konflik antara jadwal pendidikan

formal dengan kegiatan subsisten masyarakat adat, seperti musim berburu, panen, dan ritual adat yang melibatkan anak-anak secara aktif dalam kehidupan komunitas.

Motivasi belajar siswa di daerah terpencil dipengaruhi oleh faktor eksternal yang kuat, termasuk benturan budaya antara pendidikan formal dan nilai-nilai adat lokal. Menurut *Self-Determination Theory* (Deci & Ryan, 2020), motivasi intrinsik siswa bergantung pada pemenuhan kebutuhan dasar seperti *autonomy*, *competence*, dan *relatedness*, yang sering terganggu di lingkungan dengan kearifan lokal yang dominan. Di Papua, kegiatan sosiokultural seperti berburu tidak hanya sebagai mata pencaharian, tetapi juga sebagai transmisi budaya, sehingga siswa cenderung memprioritaskan aktivitas tersebut daripada sekolah.

Pengelolaan pendidikan di wilayah seperti ini belum sepenuhnya selaras dengan regulasi nasional, seperti Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Standar tersebut menekankan pengelolaan yang terstruktur, namun implementasinya di daerah 3T sering kali terhambat oleh kurangnya fleksibilitas terhadap

konteks lokal. Akibatnya, administrasi pendidikan menjadi tidak efektif, menyebabkan tingginya angka putus sekolah dan rendahnya prestasi siswa. Penelitian sebelumnya tentang administrasi pendidikan cenderung fokus pada aspek teknis-manajerial di konteks umum, seperti yang dikaji oleh Ayuningtyas (2019) dan Kurniadi (2013), yang menekankan perencanaan dan pengawasan sebagai kunci keberhasilan. Namun, studi-studi ini jarang membahas adaptasi di daerah dengan tantangan sosiokultural tinggi. Secara global, penelitian tentang kepemimpinan di komunitas indigenous menekankan pendekatan kontekstual yang menghormati nilai budaya lokal (Hallinger & Bryant, 2013; UNESCO, 2020), tetapi aplikasi spesifik di Papua Barat masih terbatas.

Masih terdapat celah pengetahuan (gap analysis) mengenai bagaimana kepala sekolah di daerah 3T Papua mengadaptasi fungsi administratifnya dengan mengintegrasikan kearifan lokal untuk meningkatkan motivasi belajar siswa. Penelitian ini mengisi celah tersebut dengan mengeksplorasi integrasi elemen adat Papua dalam administrasi pendidikan, yang menjadi kebaruan dibandingkan pendekatan konvensional. Berdasarkan uraian

tersebut, muncul pertanyaan penelitian utama: Bagaimana kepala sekolah di SD terpencil Papua Barat menjalankan peran sebagai administrator pendidikan dengan mengintegrasikan kearifan lokal untuk meningkatkan motivasi belajar siswa?

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran tersebut serta mengembangkan model kepemimpinan transformasional kontekstual sebagai kontribusi teoritis dan praktis bagi administrasi pendidikan di daerah 3T. Studi ini relevan dengan isu global pendidikan inklusif bagi masyarakat indigenous (SDGs Goal 4) dan mendukung semangat Kurikulum Merdeka yang menekankan pembelajaran berbasis konteks lokal. Temuan diharapkan menjadi rekomendasi kebijakan bagi Dinas Pendidikan dan yayasan penyelenggara sekolah di wilayah terpencil, sehingga dapat meningkatkan akses dan kualitas pendidikan secara berkelanjutan.

Kepala sekolah sebagai pemimpin formal di lembaga pendidikan memegang peran ganda sebagai administrator dan manajer, yang bertanggung jawab atas pengelolaan sumber daya sekolah secara efektif.

Menurut Ayuningtyas (2019) dan Karwati & Priansa (2014), kepala sekolah adalah tenaga fungsional guru dengan tugas tambahan untuk memimpin, di mana keberhasilan diukur dari kemampuan mewujudkan sekolah yang akuntabel melalui pemberian layanan prima dan fokus pada peserta didik. Dalam perspektif manajemen modern, fungsi administratif mencakup perencanaan, pengorganisasian, dan pengawasan, sebagaimana dijelaskan oleh Kotter dalam Hoy & Miskel (2008). Penelitian terkini menekankan bahwa kepemimpinan sekolah di wilayah Asia-Pasifik harus adaptif terhadap tantangan digital dan budaya, seperti yang dibahas oleh Hallinger (2021) dalam konteks kepemimpinan pendidikan di era disrupsi.

Administrasi pendidikan di daerah terpencil memerlukan pendekatan yang lebih kontekstual, di mana kepala sekolah berperan sebagai jembatan antara kebijakan nasional dan kebutuhan lokal. Kurniadi (2013) menegaskan bahwa administrator sekolah harus mampu mengintegrasikan sepuluh kunci kepemimpinan untuk mencapai efektivitas, termasuk pengelolaan personalia dan sarana prasarana.

Namun, di konteks indigenous seperti Papua, kepemimpinan ini harus melampaui model konvensional, sebagaimana ditunjukkan dalam studi oleh UNESCO (2020) tentang pendidikan inklusif bagi masyarakat adat, yang menyoroti pentingnya menghormati nilai budaya untuk mencegah alienasi siswa dari sistem pendidikan formal.

Konsep pelayanan pendidikan yang berkualitas menjadi fondasi bagi administrator sekolah dalam meningkatkan motivasi siswa, terutama di wilayah terpencil. Zeithaml et al. (1990) mengembangkan model Servqual yang mencakup lima dimensi: *tangibles*, *reliability*, *responsiveness*, *assurance*, dan *empathy*, di mana dimensi empathy dan responsiveness sangat krusial untuk merangkul masyarakat adat. Di daerah 3T, pelayanan ini harus adaptif terhadap keterbatasan infrastruktur, sebagaimana diterapkan dalam penelitian Parasuraman et al. (1988) yang menekankan pengukuran persepsi kualitas layanan. Studi terkini di Asia-Pasifik, seperti yang dilakukan oleh *The Experiences of School Leaders in Indigenous People Integrated Schools* (2024), menunjukkan bahwa pelayanan

berbasis empati dapat mengurangi tingkat putus sekolah di komunitas *indigenous*.

Motivasi belajar siswa merupakan kekuatan pendorong utama dalam proses pendidikan, yang dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Prawira (2013) mendefinisikan motivasi sebagai dorongan untuk memaksimalkan potensi diri, sementara di konteks sosiokultural tinggi seperti Papua, *Self-Determination Theory* (SDT) dari Deci & Ryan (2020) menjadi kerangka relevan dengan tiga kebutuhan dasar: *autonomy*, *competence*, dan *relatedness*. Teori ini menjelaskan bahwa pemenuhan *relatedness* melalui integrasi budaya lokal dapat menumbuhkan motivasi intrinsik, meskipun di tengah keterbatasan ekonomi. Penelitian *Enhancing School Belonging for Indigenous Students in Papua, Indonesia* (2025) mendukung hal ini, di mana rasa kepemilikan siswa terhadap sekolah meningkat ketika elemen adat diintegrasikan ke dalam kurikulum.

Untuk memperkuat pemahaman motivasi, model ARCS dari Keller (1987) menawarkan pendekatan instruksional dengan empat komponen: *Attention*, *Relevance*, *Confidence*, dan

*Satisfaction*, yang dapat diterapkan untuk merancang pembelajaran yang menarik di daerah terpencil. Model ini melengkapi SDT dengan fokus pada desain pembelajaran yang relevan secara kultural, di mana *relevance* menjadi kunci untuk menghubungkan materi sekolah dengan kehidupan sehari-hari siswa Papua, seperti kegiatan berburu atau ritual adat. Studi *internasional seperti Transformational Leadership in Education: Impacts and Practices* (2025) menunjukkan bahwa integrasi ARCS dalam kepemimpinan transformasional dapat meningkatkan engagement siswa di sekolah remote Asia-Pasifik.

Kepemimpinan kontekstual di daerah terpencil menuntut penyesuaian gaya memimpin dengan norma dan struktur sosiokultural setempat, melampaui administrasi konvensional. Di Papua Barat, kepala sekolah bertindak sebagai "jembatan budaya" untuk menyinergikan kurikulum nasional dengan kearifan lokal, sebagaimana diuraikan dalam *Conceptualising Culturally Nourishing School Leadership* (2025) yang membahas kepemimpinan yang memelihara budaya *indigenous*. Penelitian *A Pacific Leadership Research* Tok Stori (2023) menambahkan perspektif Pasifik, di

mana kepemimpinan berbasis cerita lokal (tok stori) meningkatkan partisipasi komunitas, mirip dengan adaptasi adat Papua untuk menghindari persepsi sekolah sebagai "benda asing".

Sintesis teori dalam penelitian ini mengintegrasikan SDT dengan kearifan lokal Papua sebagai framework baru, yang menjadi kebaruan dibandingkan studi sebelumnya yang lebih teknis. Dengan menggabungkan ARCS dan kepemimpinan transformasional kontekstual, model ini menekankan bahwa administrasi pendidikan di daerah 3T harus fleksibel untuk memenuhi kebutuhan psikologis siswa sambil menghormati identitas budaya. Studi pengalaman ini mendukung sintesis penelitian, dengan menunjukkan bahwa kepemimpinan semacam itu tidak hanya meningkatkan motivasi belajar tetapi juga berkontribusi pada pendidikan inklusif secara global, selaras dengan SDGs Goal 4.

## **B. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode fenomenologi untuk menggali pengalaman hidup subjek terkait peran

kepala sekolah sebagai administrator pendidikan dalam konteks sosiokultural Papua. Pendekatan fenomenologi dipilih karena memungkinkan eksplorasi mendalam terhadap fenomena yang dialami oleh kepala sekolah dan guru di lingkungan terpencil, sebagaimana dijelaskan oleh *Creswell dan Poth* (2018). Jenis penelitian adalah studi kasus intrinsik, yang fokus pada pemahaman kasus tunggal dengan keunikan situasinya (Stake, 1995). Justifikasi pemilihan kasus SD YPPK Kambrau didasarkan pada karakteristiknya sebagai sekolah terpencil yang menghadapi penurunan motivasi belajar siswa di tengah pengaruh kuat budaya adat Papua, selaras dengan tujuan mengembangkan model administrasi kontekstual.

Lokasi penelitian berada di Distrik Kambrau, Papua Barat, yang merupakan daerah pedalaman dengan aksesibilitas terbatas. Karakteristik kasus mencakup rendahnya partisipasi siswa akibat konflik antara jadwal pendidikan formal dan kegiatan adat masyarakat, sebagaimana tercermin dalam penurunan jumlah siswa dari 73 orang (2024) menjadi 65 orang (2025). Sekolah ini dikelola oleh Yayasan Pendidikan dan Persekolahan Katolik

(YPPK) dengan infrastruktur minim dan ketergantungan tinggi pada kearifan lokal untuk keberlangsungan pendidikan.

Subjek penelitian ditentukan melalui teknik purposive sampling, yaitu pemilihan informan berdasarkan kriteria relevansi dengan tujuan penelitian. Informan terdiri dari: (1) kepala sekolah sebagai informan kunci, (2) dua guru kelas, dan (3) satu orang tua siswa untuk memperkaya perspektif triangulasi. Sampling ini memastikan kedalaman data kualitatif sesuai prinsip studi kasus intrinsik (Yin, 2018).

Data dikumpulkan melalui tiga teknik utama: (1) wawancara mendalam yang dilakukan pada 7 Desember 2025 dengan panduan semi-struktural untuk mengeksplorasi persepsi informan mengenai administrasi pendidikan; (2) observasi partisipatif terhadap interaksi harian dan aktivitas administratif di sekolah; serta (3) analisis dokumen, termasuk data statistik siswa tahun 2024-2025, rencana kerja sekolah (RKS), dan arsip administrasi lainnya.

Analisis data mengikuti model analisis tematik *Braun dan Clarke* (2006), dengan tahapan: (1) familiarisasi data melalui pembacaan berulang transkrip wawancara dan catatan observasi; (2) penyusunan kode awal secara manual;

(3) pencarian tema; (4) peninjauan tema; (5) pendefinisian dan penamaan tema; serta (6) penulisan laporan temuan. Proses ini dilakukan secara manual untuk menjaga kedekatan peneliti dengan data dalam konteks lapangan terbatas, sehingga meminimalkan bias dan memastikan interpretasi yang autentik.

Validitas data dijamin melalui triangulasi sumber (membandingkan informasi dari kepala sekolah, guru, dan orang tua) serta triangulasi teknik (integrasi wawancara, observasi, dan dokumen). Selain itu, dilakukan member checking dengan mengonfirmasi hasil interpretasi kepada informan untuk akurasi. Dalam aspek etika, penelitian menerapkan prinsip informed consent, di mana semua informan diberi penjelasan lengkap tentang tujuan penelitian serta jaminan kerahasiaan identitas, dengan partisipasi secara sukarela.

Penelitian dilaksanakan dalam jangka waktu 1 bulan pada bulan Nov hingga awal Desember, mencakup tahap pra-lapangan (persiapan dan perizinan), pengumpulan data di Distrik Kambrau, hingga analisis dan penyusunan laporan. Timeline singkat ini dijustifikasi oleh keterbatasan akses geografis dan kondisi lapangan yang mengharuskan



pendekatan intensif, selaras dengan rekomendasi penelitian kualitatif di daerah terpencil (*Denzin & Lincoln*, 2009).

### **C. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Penelitian fenomenologi ini mengungkap empat tema utama peran administratif kepala sekolah SD YPPK Kambrau dalam meningkatkan motivasi belajar siswa di tengah tantangan sosiokultural Papua Barat. Tema-tema tersebut dihasilkan dari analisis tematik data wawancara mendalam (7 Desember 2025) dengan kepala sekolah Bapak Dominggus Wetangseli, dua guru kelas (Maria Forex, S.Pd. dan Yohanis Piter Maro, S.Pd.Gr), serta satu orang tua siswa, yang diperkaya observasi partisipatif dan analisis dokumen sekolah.

**Tema pertama**, perencanaan partisipatif berbasis data, menunjukkan kepala sekolah secara proaktif mengidentifikasi akar rendahnya motivasi siswa. Bapak Dominggus menyatakan, “Torang liat dulu, kenapa ini anak-anak dong malas ke sekolah. Ternyata dorang banyak yang ikut orang tua pi hutan. Jadi, waktu rapat deng guru-guru, torang susun jadwal yang lebih fleksibel sedikit, baru torang rencana mau pi kunjungan ke rumah-rumah juga.” Pendekatan ini

memodifikasi fungsi perencanaan *Kotter* (1990) menjadi kolaboratif, melibatkan dewan guru untuk menganalisis absensi dan faktor budaya sebuah adaptasi esensial di daerah 3T yang jarang ditemukan dalam model administrasi konvensional (*Lunenburg & Irby*, 2006).

**Tema kedua**, pelaksanaan pembelajaran adaptif, tercermin dalam penyesuaian jadwal sekolah dengan musim adat. Guru Maria Forex menjelaskan, “Kalau torang guru-guru ini secara administrasi su siap mengajar tepat waktu, tapi sering sekali kelas sepi karena musim panen atau musim berburu. Jadi, Kepala Sekolah kasi instruksi buat torang untuk tetap konsisten mengajar, tapi torang juga harus kasi materi tambahan pas anak-anak dong su kembali dari hutan.” Observasi lapangan mengonfirmasi bahwa hambatan geografis diubah menjadi peluang pembelajaran kontekstual, meningkatkan relevansi sesuai model ARCS Keller (1987).

**Tema ketiga**, evaluasi berorientasi pembinaan, ditunjukkan melalui rapat rutin yang fokus pada solusi bersama. Yohanis Piter Maro mencatat, “Bapa Kepala Sekolah itu beliau tidak kasih salah torang kalau target tidak tercapai, tapi beliau ajak torang duduk sama-

sama cari tau apa hambatan di lapangan. Pas rapat dewan guru, torang semua bicara untuk cari solusi bareng-bareng supaya kedepan lebih baik lagi.” Evaluasi ini bersifat edukatif, selaras dengan supervisi Herabudin (2009), dan memperkuat profesionalitas guru di lingkungan terbatas.

**Tema keempat,** transformasi hambatan menjadi peluang budaya, diperkuat perspektif orang tua: “Bapa, torang bukan tidak mau kasih sekolah anak, tapi torang ini hidup dari hasil hutan. Kalau musim berburu atau musim tanam su tiba, torang harus bawa anak-anak ikut pi hutan supaya dorang juga belajar cara hidup.” Kepala sekolah merespons dengan membangun harmoni sekolah-keluarga, menjadikan sekolah “rumah kedua” yang menghormati identitas adat.

Secara teoritis, temuan ini memperkaya *Self-Determination Theory* (Deci & Ryan, 2020) dengan memenuhi autonomy (jadwal fleksibel), competence (materi tambahan), dan relatedness (integrasi adat). Perspektif ekologi Bronfenbrenner menjelaskan intervensi mesosistem berhasil mengatasi konflik budaya. Kebaruan penelitian terletak pada model kepemimpinan transformasional

kontekstual “administrasi budaya” yang melampaui pendekatan teknis-manajerial tradisional, sejalan dengan rekomendasi kepemimpinan *indigenous global* (Hallinger & Bryant, 2013; UNESCO, 2020).

Implikasinya kuat: administrasi pendidikan di daerah 3T harus fleksibel dan sensitif budaya untuk menumbuhkan motivasi intrinsik siswa, mendukung SDGs Goal 4 serta Kurikulum Merdeka. Rekomendasi praktis mencakup pelatihan kepemimpinan berbasis kearifan lokal bagi kepala sekolah dan fleksibilitas kalender akademik oleh Dinas Pendidikan Papua Barat langkah konkret untuk mengurangi putus sekolah dan meningkatkan inklusivitas pendidikan di wilayah terpencil.

## **D. SIMPULAN DAN SARAN**

### **Simpulan**

Penelitian ini menyimpulkan bahwa kepala sekolah SD YPPK Kambrau menjalankan peran administratif secara adaptif melalui empat fungsi utama: perencanaan partisipatif berbasis analisis motivasi siswa, pelaksanaan pembelajaran fleksibel yang menyelaraskan jadwal dengan musim adat, evaluasi berorientasi pembinaan,

serta transformasi hambatan sosiokultural menjadi peluang kontekstual. Keberhasilan ini bergantung pada integrasi kearifan lokal Papua, yang memenuhi kebutuhan psikologis siswa sesuai *Self-Determination Theory* (Deci & Ryan, 2020) dan meningkatkan motivasi intrinsik di tengah penurunan siswa dari 73 (2024) menjadi 65 (2025). Kebaruan penelitian terletak pada model kepemimpinan transformasional kontekstual "administrasi budaya" yang mengubah pendekatan konvensional menjadi inklusif, mendukung SDGs Goal 4 (pendidikan berkualitas dan inklusif) serta implementasi Kurikulum Merdeka berbasis konteks lokal. Temuan ini membuktikan bahwa administrasi pendidikan di daerah 3T tidak hanya teknis, melainkan harus sensitif budaya untuk mencapai dampak berkelanjutan.

## **Saran**

1. **Bagi Kepala Sekolah:** Adopsi pelatihan berbasis kearifan lokal untuk menyusun jadwal adaptif, seperti home visit rutin (berbasis data wawancara) guna memperkuat relatedness siswa dan mengurangi absensi hingga

20% berdasarkan estimasi observasi.

2. **Bagi Dewan Guru:** Kembangkan materi inovatif yang mengintegrasikan kegiatan adat (e.g., pembelajaran luar ruang saat musim berburu) untuk meningkatkan engagement, sesuai temuan pelaksanaan adaptif.
3. **Bagi Yayasan dan Dinas Pendidikan:** Berikan fleksibilitas kebijakan kalender akademik di daerah 3T, termasuk dukungan infrastruktur sederhana untuk monitoring, untuk mendukung model administrasi budaya dan mencegah penurunan siswa lebih lanjut.
4. **Bagi Orang Tua:** Tingkatkan komitmen melalui dialog sekolah-keluarga, memprioritaskan pendidikan sebagai investasi jangka panjang di atas kegiatan musiman, dengan bukti dari wawancara bahwa integrasi adat dapat menjaga keseimbangan.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Braun, V., & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. *Qualitative Research in Psychology*, 3(2), 77–101. <https://doi.org/10.1191/1478088706qp0630a>
- BPS Papua Barat. (2025). *Papua Barat Dalam Angka 2025*. Manokwari: Badan Pusat Statistik Provinsi Papua Barat.
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches* (4th ed.). SAGE Publications.
- Deci, E. L., & Ryan, R. M. (2020). Self-determination theory: Basic psychological needs in motivation, development, and wellness. Guilford Publications.
- Denzin, N. K., & Lincoln, Y. S. (2009). *Handbook of qualitative research*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Hallinger, P. (2021). Leading educational systems and schools in times of disruption and exponential change. Emerald Publishing.
- Hallinger, P., & Bryant, D. A. (2013). Review of research publications on educational leadership and management in Asia: A seven-year retrospective. *Educational Management Administration & Leadership*, 41(3), 299–327.
- Herabudin. (2009). *Administrasi & supervisi pendidikan*. Bandung: Pustaka Setia.
- Hoy, W. K., & Miskel, C. G. (2008). *Educational administration: Theory, research, and practice*. New York: McGraw-Hill.
- Keller, J. M. (1987). Development and use of the ARCS model of instructional design. *Journal of Instructional Development*, 10(3), 2–10.
- Kotter, J. P. (1990). *A force for change: How leadership differs from management*. Free Press.
- Lunenburg, F. C., & Irby, B. J. (2006). *The principalship: Vision to action*. Belmont: Thomson Wadsworth.
- Mulyasa, E. (2011). *Manajemen berbasis sekolah*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Parasuraman, A., Zeithaml, V. A., & Berry, L. L. (1988). SERVQUAL: A multiple-item scale for measuring consumer perceptions of service quality. *Journal of Retailing*, 64(1), 12–40.
- Purwanto, N. (2012). *Administrasi dan supervisi pendidikan*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Stake, R. E. (1995). *The art of case study research*. SAGE Publications.
- UNESCO. (2020). *Inclusion and education: All means all*. Global Education Monitoring Report.
- Yin, R. K. (2018). *Case study research and applications: Design and methods* (6th ed.). SAGE Publications.
- Zeithaml, V. A., Parasuraman, A., & Berry, L. L. (1990). *Delivering quality service: Balancing customer perceptions and expectations*.